

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad, Nurul, *Ensiklopedia Penyelenggaraan Pemerintahan*, Semarang: Alprin, 2010.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Diantha, Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, Cetakan kelimabelas.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.
- Johan, Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Deepublish, 2018.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020

- Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2019, Cetakan keenam.
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Simorangkir, JCT dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Syafiie, Inu Kencana, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Syahrizal, Darda, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat I Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

JURNAL

Belekubun, Rivaldo A, *Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019*, Policy Paper 2020.

Bimasakti, Muhammad Adiguna, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatig Overheidsdaad) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 Nomor 2, 2018.

Dewi, Dyah Adriantini Sintha, *Pendayagunaan freies ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia, Vol. 5 No. 1, 2016.

Gothama, Made Aryandi Singa dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, *Kewenangan Pemerintah dalam Membatasi Akses Media Sosial dalam Persepektif HAM*, Artikel Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jamal, Ahmad Yani, *Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pajak*, Journal Article Legal Opinion 2017.

Kurniawaty, Yuniar, *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 01 Maret 2016.

Mulyana, Asep, *Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM*, Artikel Referensi ELSAM, 2015.

Nasarudin, Tubagus Muhammad, *Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7, No. 2 Agustus 2016.

WEBSITE

Elvitaww, *“Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya”*, (3 September 2019), <https://ylbhi.or.id>

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>

Samuel Abrijani Pangerapan, “*Pembatasan Akses Internet di Papua Sesuai Hukum*”, (20 September 2019), <https://aptika.kominfo.go.id>

Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019, “*Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat*”, (21 Agustus 2019), <https://www.kominfo.go.id>

Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019, “*Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat Masih Berlanjut*”, (23 Agustus 2019), <https://www.kominfo.go.id>